



Jurnal Bakaba
Volume 8, Nomor 2, Bulan Juli-Desember, 2020

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Budi Juliardi

Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 2, Juli-Desember 2020

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Budi Juliardi, Tahun 2020. Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 2, bulan Juli-Desember, 2020: 72-78.

Copyright © 2020, Jurnal Bakaba

ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



Demokrasi dan Masyarakat Madani

Budi Juliardi¹

¹Dosen Program Studi PPKn STKIP PGRI Sumatera
Barat

Email : [a](mailto:rizhan_budi@yahoo.com) Email : rizhan_budi@yahoo.com

ABSTRACT

Democracy and civil society are two concepts that cannot be separated from one another. In essence, democracy will only be implemented well in a civil society. Correspondingly, a civil society will definitely implement the principles of democracy. Today, all countries in the world claim that they apply the concept of democracy. However, is the implementation of democracy carried out in accordance with democratic principles that should be adhered to by civil society? Not necessarily, because many countries claim to adhere to the principle of democracy, but its implementation is still not democratic.

Keywords : *democracy, civil society, civilization*

ABSTRAK

Demokrasi dan masyarakat madani merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pada hakikatnya, demokrasi hanya akan terlaksana dengan baik dalam sebuah masyarakat yang madani. Sejalan dengan itu, sebuah masyarakat madani pasti akan melaksanakan prinsip demokrasi. Saat ini, seluruh Negara di dunia mengklaim bahwa mereka menerapkan konsep demokrasi. Akan tetapi, apakah pelaksanaan demokrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya dianut oleh masyarakat madani? Belum tentu, karena banyak Negara- negara yang mengklaim menganut asas demokrasi, akan tetapi pelaksanaannya masih belum demokratis.

Kata Kunci : *demokrasi, masyarakat madani, keadaban*

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Larry Jay Diamond (dalam Santoso, 2011) mengatakan bahwa *civil*

society adalah alam kehidupan sosial terorganisir dan terbuka, berpemerintahan sendiri, paling tidak sebagian telah mampu mandiri, otonom dari negara dan terikat dengan aturan hukum atau serangkaian aturan

bersama.

Sementara itu, dalam pandangan Hegel, *civil society* memiliki entitas yang memiliki ketergantungan pada negara. Sebagai contoh; negara harus mengawasi *civil society* dengan cara menyediakan perangkat hukum dan administrasi (Masroer dan Lalu Darmawan, 2016).

Disamping itu, *civil society* menurut para tokoh juga berbeda-beda, seperti Hegel yang berpendapat entitas *civil society* mempunyai kecenderungan entropi atau melemahkan diri sendiri (*a self crippling entity*), oleh karena itu harus diawasi oleh negara. Pandangan Hegel yang agak pesimistik ini, akhirnya memiliki gayut dengan pandangan Karl Marx tentang *civil society*. Bahkan Karl Marx memposisikan *civil society* pada *basic material* dalam tautan dengan produksi kapitalis. Oleh Marx, *civil society* dimaknai sebagai kelas borjuis yang menjadi tantangan baginya untuk membebaskan masyarakat dari berbagai penindasan, oleh karena itu *civil society* menurut dia harus dilenyapkan demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas (Asshiddiqie, 2005:56).

Tokoh lain adalah Gramsci. Dalam banyak hal pendapat Gramsci mirip pendapat Marx. Perbedaannya terletak pada memposisikan *civil society* bukan

pada *basic material* tetapi pada tataran suprastruktur, sebagai wadah kompetisi untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Peran *civil society* pada konteks yang demikian oleh Gramsci ditempatkan sebagai kekuatan pengimbang di luar kekuatan negara. Pandangan Gramsci ini lebih bernuansa ideologis ketimbang pragmatik.

Dalam perjalanan waktu, akhirnya konsep Gramsci ini dikembangkan oleh Habermas seorang tokoh madzab Frankfurt melalui konsep *the free public sphere* atau ruang publik yang bebas, di mana rakyat sebagai *citizen* memiliki akses atas setiap kegiatan publik.

Bahmueller menyatakan bahwa terdapat beberapa buah karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

1. terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. dilengkapinya program-

program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4. terjemataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim- rezim totaliter.
6. meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif (Suharno, 2007).

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Pemerintahan dalam masyarakat madani memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara atau *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus (Rahardjo, 2001:12).

Bila dikaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security*; *civil responsibility* dan *civil resilience*).

Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sebagai berikut:

- 1) terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat,
- 2) berkembangnya modal manusia

(*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.

- 3) tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial, adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan,
- 4) adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan,
- 5) terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial,
- 6) adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan
- 7) terjalinya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya (Lubis, 2001:56).

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat

madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia.

Masyarakat Madani dalam Pemerintahan Komunis di Eropa Timur

Gelombang Demokrasi Eropa Timur dan Tekanan Internasional tidak lahir dari ruang kosong atau vakum. Eropa Timur dan Rusia mengalami hiruk-pikuk gelombang ini. Bahkan getarannya sampai di Asia. Kebangkitan masyarakat yang berperadaban (*civil society*) di Eropa Timur dan Rusia telah mewujudkan demokrasi yang mulai menyapu kawasan itu secara dramatis pada 1989-1991. Transisi kekuasaan dari dominasi elite totaliter menuju sistem politik yang demokratis telah meningkat. Para inteligensia, agamawan dan kelas pekerja sangat berperan dan berarti dalam pembentukan kekuatan masyarakat madani (*civil society*).

Kebebasan dan demokrasi telah diaktualisasikan melebihi proporsi sehingga solidaritas dan ikatan lama menjadi tidak relevan lagi. Sementara nilai dan ikatan baru masih dalam pencarian. Nasionalisme agresif yang mencuat kini berusaha menemukan simbol dan ideologi baru, sekalipun mengorbankan integrasi nasionalnya.

Krisis ekonomi dan politik yang tali-temali telah melanda hampir sebagian besar bekas Soviet yang mengangakan ruang (*space*) bagi destabilisasi regional. Politik identitas yang mendasari gerakan separatisme

dan nasionalisme agresif nampak tengah meruak ke seluruh Eropa Timur dan bekas Soviet dalam kadar dan dimensi yang berbeda-beda.

Di satu sisi reformasi ekonomi pasca komunisme mulai mendapat tempat yang leluasa di Hongaria, Polandia, Rumania dan Bulgaria dan sebagainya. Namun di sisi lain gejala politik identitas atau nasionalisme agresif menimbulkan imajinasi suram yang bisa mendistorsi reformasi itu.

Dalam konteks negara-negara Timur dan independensi republik-republik bekas Soviet, belum jelas apakah demokrasi liberal (Barat) yang akan diterapkan kemudian atau muncul justru ideologi baru yang lebih khas, spesifik dengan kondisi sosio-budaya masing-masing.

Masyarakat Madani, Keadaban, dan Demokrasi

Dalam upaya untuk mengembangkan peran *civil society* maka disini diperlukan adanya sistem demokrasi dalam suatu negara. Dan rasanya sangat sulit bagi sebuah negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi untuk menerapkan sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat, India, dan lain-lain. Demokrasi ternyata tak cukup hanya dibangun dengan terpilihnya pemimpin sipil lewat pemilihan umum atau terjunjalnya sebuah pemerintahan otoriter.

Demokrasi ideal membutuhkan kepemimpinan politik yang mampu membangun fondasi bagi tegaknya supremasi hukum, terjaminnya hak-hak asasi warga negara, pers yang bebas, dan sistem politik memungkinkan *checks and balances* di antara

lembaga-lembaga negara (Azizy, 2002:76).

Di sisi lain, demokrasi juga baru bisa berjalan bila masyarakatnya ikut mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, *good governance* hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani (*civil society*) yang memosisikan dirinya sebagai penyeimbang negara.

Masyarakat demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat berperadaban, yaitu masyarakat madani. Yang ada dalam jiwa masyarakat madani adalah jiwa *madaniyah*, *civility*, yaitu keadaban itu sendiri atau sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar, dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah.

Dari keadaan lahir sikap yang tulus untuk menghargai sesama manusia, betappaun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri. Karena itu, keadaan atau *civility* menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindar dari kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain, sebab "Kalau-kalau mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang direndahkan".

Kalau saja kita mau jujur, makna *civil society* yang kita idamkan (walau sebagian) adalah konsep *civil society* menurut Habermas. Kita telah lama memimpikan ruang publik yang bebas tempat mengekspresikan keinginan kita atau untuk meredusir, meminimalisir berbagai intervensi, sikap totaliter, sikap etatisme pemerintah.

Pada ruang publik inilah kita memiliki kesetaraan sebagai aset untuk melakukan berbagai transaksi wacana tanpa harus takut dicituk, diintimidasi atau ditekan oleh penguasa.

The free public sphere merupakan inspirator, motivator sekaligus basis bagi mekanisme demokrasi modern, seperti yang dialami oleh Amerika, bangsa Eropa dan kawasan dunia lain. Demokrasi modern secara substantif mengacu pada kebebasan, kesetaraan, kemandirian, kewarganegaraan, regularisme, desentralisme, aktivisme, dan konstitusionalisme. Persoalannya bagaimana cara yang efektif agar spirit demokrasi

modern ini bisa disemaikan dengan baik? Jawabannya, adalah kita mesti membangun dan mengembangkan institusi seperti LSM, organisasi sosial, organisasi agama, kelompok kepentingan, partai politik yang berada di luar kekuasaan negara, termasuk Komnas HAM yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini tidak serta merta menghilangkan keterhubungannya dengan negara atau bersifat otonom.

CONCLUSION / KESIMPULAN

Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi melahirkan pelaksanaan HAM yang murni. Jadi, HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui

dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian memunculkan masyarakat madani.

REFERENCES / DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. "Demokrasi dan HAM". Makalah yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Azizy, Qodri. 2002. "Pengembangan Civic Education di Kampus dalam Proses Demokratisasi dalam Rangka Menuju Masyarakat Madani". Makalah Seminar nasional II Civic Education di Perguruan Tinggi, Mataram, 22-23 April 2002.
- Lubis, Todung Mulya. 2001. "Demokrasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Internasional. Makalah Seminar nasional Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei 2001.
- Masroer, C dan Lalu Darmawan. 2016. "Wacana *Civil Society* (Masyarakat Madani) di Indonesia". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 10, NO. 2, April 2016
- Raharjo, M. Dawan. 2001. *Civil Society di Indonesia*. Makalah Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN se-Indonesia, Depok, 7 Agustus 2001.
- Santoso, Purwo. 2011. "Menolak Stagnasi Demokratisasi: Otonomi Daerah

Sebagai Aktualisasi”. *Jurnal Riptek* Vol. 5 No. 1 Tahun 2011, Hal: 45 –60

Suharno. 2007. “Telaah Kritis Terhadap Masyarakat Madani (*Civil Society*)”. *Jurnal Civic*, Vol. 4 No. 2 Desember 2007